

© 2005 Sekolah Pasca Sarjana IPB
Makalah Kelompok II, Materi Diskusi Kelas
Pengantar Falsafah Sains (PPS702)
Program Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
Sem 2 2004/5

Posted 6 April 2005

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr Hardjanto

PEMBANGUNAN PERDESAAN MENUJU DESA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA

Oleh: Kelompok II

**Abdul Kohar M, Dudi, Iwang Gumilar, Muhamad Syukur,
Nurmi, Wildani Pingkan**

ABSTRAK

Pembangunan desa semakin menantang di masa depan pada kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis, sudah saatnya pendekatan pembangunan perdesaan secara integral dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan prospek dari masing-masing daerah dan pendekatan sektoral serta regional. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan multiplier efek yang luas dan keterkaitan baik ke belakang maupun ke depan baik antar desa maupun antara desa dengan kota, dalam upaya untuk perbaikan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.

Kata Kunci : desa, kemiskinan, mandiri, sejahtera, multiplier efek.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa

masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas/sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Beberapa program-program pembangunan perdesaan yang pernah dilaksanakan, misalnya program bidang pangan, program Inpres Desa Tertinggal, dan Program Pusat Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan perdesaan dalam mengejar ketertinggalannya dari perkotaan. Guna mendorong peningkatan pangan, program-program pembangunan yang pernah dilaksanakan adalah KOGM (Komando Gerakan Makmur), Bimas (Bimbingan Massal), Inmas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), dan Supra Insus. Selain itu guna menyokong program pangan, pemerintah menyediakan bantuan kredit usaha tani (KUT) bagi para petani dalam memberikan permodalan dalam pengelolaan lahannya.

Akan tetapi, program-program tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT sampai saat ini banyak yang menunggak karena petani tidak mampu membayar cicilan tersebut. Adapun program IDT dan PPTAD lebih cenderung pada pembangunan fisik saja sehingga penekanan terhadap pembangunan masyarakat umum kurang tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pembangunan masyarakat desa sesungguhnya sangat mendesak, seperti ketertinggalan desa dari kota hampir disegala bidang, tidak terakomodasinya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam program-program pemerintah, dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih rendah.

Berdasarkan pengalaman tersebut sudah seharusnya pendekatan pembangunan perdesaan mulai diarahkan secara integral dengan mempertimbangkan kekhasan daerah baik dilihat dari sisi kondisi, potensi dan

prospek dari masing-masing daerah. Namun di dalam penyusunan kebijakan pembangunan perdesaan secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok (Haeruman, 1997), yaitu:

1. Kebijakan secara tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan perdesaan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, seperti penyediaan prasarana dan sarana pendukung (seperti pasar, pendidikan, kesehatan, jalan), penguatan kelembagaan, dan perlindungan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui perundang-undangan.
2. Kebijakan yang langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan.
3. Kebijakan khusus menjangkau masyarakat melalui upaya khusus, seperti penjaminan hukum melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Di samping itu, kebijakan pembangunan perdesaan harus dilaksanakan melalui pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Di dalam kenyataan, pendekatan regional sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan hanya untuk beberapa daerah tertentu, seperti daerah terbelakang, daerah perbatasan, atau daerah yang diharapkan mempunyai posisi strategis dalam arti ekonomi-politis. Oleh karena arah yang dituju adalah gabungan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial (Azis, 1994).

Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) tahun 1992 menyebutkan bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional atau wilayah propinsi dan kabupaten/kota. Penataan kawasan perdesaan harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di kawasan yang bersangkutan. Kawasan perdesaan merupakan kawasan

yang memiliki kegiatan utama di sektor pertanian, termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa membangun pertanian pada hakekatnya adalah membangun perekonomian desa itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pertanian yang ada di desa sangat beragam. Karakteristik kegiatan perekonomian pada suatu kawasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga sektor pertumbuhan (Soedrajat, 1997), yaitu (1) *sektor pertumbuhan primer*, yakni sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian, (2) *sektor pertumbuhan suplementer*, yakni sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer, dan (3) *sektor pertumbuhan terkait*, yakni sektor atau ekonomi yang berkembang seiring dengan kenaikan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri.

Biro Pusat Statistik (1990) mengklasifikasikan sektor perekonomian pada Tabel *Input-Output* (Tabel I-O) tahun 1990 ke dalam dua kriteria, yaitu asas kesatuan komoditi dan kesatuan kegiatan (Tjandrawan, 1994). Prinsip utama pengklasifikasian ini adalah keseragaman (homogenitas) dari tiap sektor, sehingga barang dan jasa atau kegiatan perekonomian yang tercakup dalam satu sektor harus memiliki sifat yang relative homogen. Oleh karena itu, pengklasifikasian 19 sektor pada tabel I-O Tahun 1990, khususnya untuk sektor pertanian, dibagi ke dalam enam sub sektor pertanian, yaitu padi/persawahan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat dijadikan dasar keragaman kegiatan pertanian di perdesaan.

Adapun Mubiyarto (1994) membagi tipologi desa tertinggal di Propinsi Jawa Tengah ke dalam sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan karakteristik desa adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil, desa buruh industri, dan desa jasa dan perdagangan. Sedangkan Soedrajat (1997) membagi tipologi ke dalam 4 kategori, yaitu:

1. Desa pantai adalah desa yang kegiatan utamanya dalam penangkapan ikan,
2. Desa persawahan adalah desa yang mayoritas penggunaan lahan untuk persawahan terutama tergantung pada produktivitas penanaman padi,
3. Desa perkebunan adalah desa yang mayoritas penggunaan lahannya untuk perkebunan,
4. Desa perladangan adalah desa yang kegiatan utamanya dalam perladangan (menanam tanaman pangan tadah hujan dan palawija).

Sedangkan berdasarkan kriteria Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), tipologi desa dibagi ke dalam enam tipologi berdasarkan kegiatan ekonominya, yaitu desa industri, desa pertanian tanaman pangan, desa perkebunan, desa perikanan, desa pariwisata/jasa, dan desa peternakan.

Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa belum ada keseragaman dalam penentuan tipologi desa. Namun terdapat kesamaan pandangan dalam penentuan tipologi desa yaitu didasarkan pada kegiatan perekonomian yang utama dari desa tersebut. Dengan mengetahui komponen utama dari aktivitas ekonomi suatu desa, maka kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan tipologi desa tersebut. Pembangunan desa yang terfokus pada kegiatan ekonomi desa tersebut, diharapkan dapat memberikan multiplier efek yang luas, seperti perluasan lapangan kerja, investasi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Selain itu diharapkan terjadinya keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward and forward linkages*) baik antar desa maupun antara desa dengan kota. Lebih lanjut diharapkan adanya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut dan sekaligus dapat mengatasi kemiskinan yang ada di desa.

1.2 Perumusan Masalah

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan perdesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah perdesaan, yaitu:

1. Pembangunan perdesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan inheren masyarakat

desa. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan perdesaan sebagai suatu interaksi antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan perdesaan.

Table 1. Indonesia : Garis Kemiskinan, perkiraan jumlah dan prosentase masyarakat miskin, 1976-1999

Tahun	Garis kemiskinan (rupiah/capita/m)		% Jumlah Orang Miskin (<i>Po – Headcount Index</i>)				Jumlah Orang Miskin (juta orang)			
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota & desa	% perubahan	Kota	Desa	Kota & desa	Perubahan absolut (juta)
1976	4 522	2 849	38.8	40.4	40.1	-	10,0	44,2	54,2	-
1978	4 969	2 981	30.8	33.4	33.3	-6.8	8,3	38,9	47,2	-7,0
1980	6 831	4 449	29.0	28.4	28.6	-4.7	9,5	32,8	42,3	-4,9
1981	9 777	5 877	28.1	26.5	26.9	-1.7	9,3	31,3	40,6	-1,7
1984	13 731	7 746	23.1	21.2	21.6	-5.2	9,3	25,7	35,0	-5,6
1987	17 381	10 294	20.1	16.1	17.4	-4.2	9,7	20,3	30,0	-5,0
1990	20 614	13 295	16.8	14.3	15.1	-2.3	9,4	17,8	27,2	-2,8
1993	27 905	18 244	13.4	13.8	13.7	-1.4	8,7	17,2	25,9	-1,3
1996	38 246	27 413	9.7	12.3	11.3	-2.3	7,2	15,3	22,5	-3,4
1996a	42 032	31 366	13.6	19.9	17.7	-	9,6	24,9	34,5	-
Des. 1998	96 959	72 780	21.9	25.7	24.2	6.5	17,6	31,9	49,5	15,0
Feb. 1999	92 409	74 272	19.5 (19.4)	26.1 (26.0)	23.5 (23.4)	-0.7	15,7 (15,6)	32,7 (32,4)	48,4 (48,0)	-1,1
Ags. 1999	89 845	69 420	15.1 (15.0)	20.2 (20.0)	18.2 (18.0)	-5.3	12,4 (12,3)	25,1 (24,8)	37,5 (37,1)	-10,9

catatan: 1. (...) gambaran tanpa Propinsi Timor Timur.

2. gambaran tahun 1996a-Ags.1999 berdasarkan standar minimum kebutuhan pangan dan non pangan pada garis kemiskinan.

Sumber: BPS, 2000, *Penyempurnaan Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin dan Profil Kemiskinan 1999*

(The revised methodology of counting the poor and poverty profiles 1999).

Adapun sasaran pokok pembangunan perdesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di perdesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan

berkelanjutan. Sasaran pembangunan perdesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah: *pertama*, peningkatan kualitas tenaga kerja di perdesaan, *kedua*, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa; *ketiga*, penguatan lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat desa; *keempat*, pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; *kelima*, pengembangan prasarana dan sarana perdesaan; dan *keenam*, pemantapan keterpaduan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan.

Namun dalam mewujudkan sasaran pembangunan perdesaan tersebut banyak kendala yang akan dihadapi, yaitu masalah pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, konflik sosial dan lain sebagainya. Masalah kemiskinan menyebabkan ketimpangan baik antargolongan penduduk, antarsektor kegiatan ekonomi maupun antardaerah. Dalam lingkup yang lebih luas, masalah kemiskinan dan kesenjangan akan memicu kecemburuan sosial, dan pada akhirnya mengganggu kelangsungan pembangunan.

Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan selama kurun waktu 1976 hingga tahun 1999 disajikan dalam Tabel 1. Bila pada tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) penduduk miskin adalah 22,5 juta atau 11,3%, maka pada akhir tahun 1998 jumlah penduduk miskin telah mencapai 49,5 juta jiwa atau 24,2%. Dari prosentase tersebut, jumlah penduduk miskin yang ada di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini bisa dimungkinkan karena sebagian besar penduduk Indonesia berdomisili di perdesaan yang bermata pencaharian di sektor pertanian.

Dilihat dari profilnya, rumah tangga miskin di Indonesia rata-rata mempunyai 5,9 anggota per rumah tangga, di mana rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai 5,6 anggota per rumah tangga sedangkan di daerah perdesaan mempunyai 6,1 anggota per rumah tangga. Dari angka tersebut diketahui bahwa beban kepala rumah tangga miskin di daerah perdesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan.

Ciri lain yang melekat pada rumah tangga miskin adalah tingkat pendidikan yang rendah. Data BPS 1993 memperlihatkan bahwa 72,01% dari

rumah tangga miskin di pedesaan di pimpin oleh kepala rumah tangga yang tidak tamat SD dan 24,32% dipimpin oleh kepala rumah tangga yang berpendidikan SD. Ciri rumah tangga miskin lain yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan sebaran lokasi rumah tangga adalah sumber penghasilan. Sekitar 62% dari rumah tangga miskin penghasilan utamanya bersumber dari sektor pertanian, 10,4% dari sektor perdagangan, 7,4% dari sektor industri, 6,5% dari sektor jasa-jasa dan selebihnya dari sektor bangunan, pengangkutan, dan lainnya. Apabila dibedakan menurut daerah, sebagian besar atau sekitar 79,5% rumah tangga miskin di pedesaan mengandalkan pada sumber penghasilan di sektor pertanian. Ini konsisten dengan corak rumah tangga pedesaan yang sebagian besar adalah rumah tangga petani.

Kesenjangan

Dari data BPS dapat dicatat bahwa pembagian pendapatan antar golongan penduduk dalam kurun waktu 1978-1993 menunjukkan kecenderungan membaik. Perbaikan dalam pembagian pendapatan antar kelompok penduduk ditunjukkan oleh menurunnya indeks ketidakmerataan Gini dari 0,38 pada tahun 1978 menjadi 0,32 pada tahun 1990. Meski jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks Gini meningkat menjadi 0,34 pada tahun 1993. Ini berarti terjadi kesenjangan antar golongan cenderung meningkat. Akan tetapi pada tahun 1996 dan 1999, ketidakmerataan yang terjadi di pedesaan cenderung menurun di mana indeks Gini pada tahun 1996 adalah sebesar 0.274 dan pada tahun 1999 menjadi 0.244 (Bappenas, 2001). Ini menunjukkan bahwa daerah pedesaan relatif mempunyai kemampuan untuk bertahan pada kondisi krisis.

Struktur Tenaga Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar tenaga kerja (bekerja atau mencari kerja), disebut sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur. Berdasarkan data BPS (2000), angka pengangguran di daerah pedesaan lebih

rendah dibandingkan dengan perkotaan. Di mana pada tahun 1998 dan 2000, angka pengangguran di perdesaan masing-masing 3,3% dan 4,1% sedangkan diperkotaan masing-masing 9,3% dan 9,2%.

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Di perdesaan, sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan cenderung terjadi peningkatan dari 62,9% pada tahun 1998 menjadi 66,1% pada tahun 2000. Kecenderungan tersebut dimungkinkan karena saat krisis ekonomi sektor industri dan jasa mengalami keterpurukan sehingga banyak yang mengalihkan pekerjaannya kepada sektor pertanian.

Perubahan Struktur Lahan

Perkembangan lain yang terjadi di daerah perdesaan adalah terjadi perubahan pada aset penguasaan lahan. Luas lahan yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian menurun sebesar 4,8% dari 16,6 juta hektar pada tahun 1983 menjadi 16,0 juta hektar pada tahun 1993 (BPS, 1994). Sementara luas lahan yang dikuasai menurun sebesar 3,8% dari 18,3 juta hektar menjadi 17,7 juta hektar. Penurunan luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian terutama terjadi di Jawa yang menurun sebesar 14,5%.

Implikasinya adalah menurunnya luas lahan yang dikuasai dan meningkatnya jumlah rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Jumlah petani gurem ini meningkat dari 9,5 juta rumah tangga pada tahun 1983 menjadi 10,9 juta rumah tangga petani pada tahun 1993. Bertambahnya jumlah petani gurem ditunjukkan oleh menurunnya penguasaan lahan pertanian di Jawa dari 0,6 ha pada tahun 1983 menjadi 0,5 ha pada tahun 1993, sedangkan di luar Jawa menurun dari 1,6 ha menjadi 1,3 ha. Keterbatasan lahan yang dikuasai oleh petani akan mempersempit peluang bagi masyarakat desa untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan.

Kelembagaan

Kelembagaan masyarakat desa mencakup dua pola hubungan, yaitu hubungan sosial dan ekonomi. Di berbagai daerah, peran dari lembaga adat masih cukup dominan terutama di daerah dengan ikatan sosial antar anggota masyarakat masih kuat (*social relation*) yang pada akhirnya menciptakan aturan, kesepakatan, dan kewajiban sosial (*social obligation*). Akan tetapi kondisi tersebut secara gradual mengalami pergeseran. Hubungan yang semula didasarkan pada aspek sosial bergeser menjadi hubungan mempertimbangkan aspek imbalan ekonomi (*economic relation*).

Berbagai permasalahan desa tersebut menjadi gambaran umum kondisi yang terjadi di daerah pedesaan. Identifikasi permasalahan tersebut selanjutnya harus dijadikan input yang berharga dalam meningkatkan pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan desa adalah meningkatkan perekonomian desa yang dibangun berdasarkan tipologi dan potensi desa. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala pembangunan desa dapat dijadikan salah satu target dari upaya pembangunan pedesaan.

1.3 Tujuan Penulisan Makalah

Penulisan makalah ini mempunyai tujuan antara lain :

1. Mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan gagalnya pembangunan desa.
2. Menggali potensi sumber daya kehidupan di desa
3. Mencari alternatif model pembangunan pedesaan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Penyebab Gagalnya Pembangunan Desa

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka sangat jelas terlihat, permasalahan aktual yang dihadapi dalam topik makalah ini adalah masih tertinggalnya kehidupan masyarakat di pedesaan, ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, jika pada tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) penduduk miskin 22,5 juta jiwa atau 11,3 %, maka pada akhir tahun 1998 jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta jiwa. Dari prosentase tersebut, penduduk miskin yang ada di desa lebih tinggi dibandingkan dengan di kota, (BPS,2000). Ini merupakan kondisi objektif yang dihadapi, dan merupakan

tantangan dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa saat ini, walau berbagai program pembangunan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pusat Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD), Komando Gerakan Makmur (KOGM), Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Masal (Inmas), Intensifikasi Khusus (Insus) dan Supra Insus, dan Kredit Usaha Tani (KUT), ternyata desa dan masyarakatnya tidak berubah menjadi lebih baik dan maju, bahkan tetap saja tertinggal.

Hal ini merupakan pertanyaan besar yang perlu dijawab, sebelum memberikan alternatif solusi penanganannya, satu pertanyaan besar untuk ini, yaitu, mengapa program-program pembangunan yang pernah dilakukan tidak mampu menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat desa?. Mengapa kehidupan masyarakat desa makin terpuruk?, bahkan mengapa banyak masyarakat desa kemudian menjadi bagian dari gelombang urbanisasi, beramai-ramai meninggalkan desa, menuju kota untuk mengadu nasib dan menggantungkan masa depannya di kota yang juga belum pasti?. Berikut ini disampaikan beberapa sebab mengapa pembangunan di desa gagal.

1. Seluruh program yang disebutkan di atas, jika dikaji lebih jauh dan seksama, merupakan program seragam yang diberlakukan secara nasional, sama dari Sabang sampai Merauke, tanpa memperhatikan potensi masing-masing desa, mulai dari karakteristik alam, hingga kondisi sosial budaya, serta sumber daya dan kebutuhan masyarakat.
2. Program terlihat berjalan dengan lancar, namun ketika selesai, ternyata, kesejahteraan masyarakat tidak kunjung meningkat, dengan kata lain program-program tersebut gagal mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
3. Faktor lingkungan yang berubah dengan sangat cepat, neo-liberalisasi yang juga melanda sektor pertanian yang menjadi tumpuan kehidupan di desa tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan pola dan program pembangunan desa.
4. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa masih cenderung pasif dan menerima apapun yang ditentukan pemerintah melalui program-

program pembangunan, seperti yang telah disebutkan diatas, cenderung mengikuti, tanpa protes walaupun pada akhirnya terbukti program-program tersebut terbukti tidak memberi manfaat yang berarti bagi peningkatan kesejahteraannya.

5. Kondisi sumber daya manusia petani Indonesia yang sangat terbatas, posisi yang lemah karena ketidakterwakilannya di 'panggung' politik menyebabkan desa semakin tidak nyaman, dan kehidupan petani Indonesia semakin tidak menentu.
6. Tidak berpihaknya pemerintah untuk sepenuhnya mengembangkan ekonomi kerakyatan.
7. Ketidakmampuan petani mengambil berbagai keputusan penting dalam kegiatan usahanya, misalnya keputusan menentukan komoditas, menetapkan harga, dan membela kepentingan-kepentingannya dalam level kebijakan.

Kini walaupun kota menjadi sangat padat, tetap saja menjadi daya tarik bagi masyarakat desa, arus urbanisasi makin tak terkendali, guncangan kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan utama terus menerus terjadi, menyebabkan ketahanan hidup masyarakat goyah. Saat ini desa tidak dapat lagi berkembang secara alami sebagai lumbung produksi yang baik dan sehat, petani menjerit, dan berusaha bertahan hidup hari demi hari perusahaan-perusahaan multinasional raksasa dibidang agribisnis dan agribisnis pangan telah menguasai pasar petani lokal. Petani di desa tidak mampu bersaing mengisi pasar-pasar moderen hingga kios-kios di kampung dengan produk olahan pertaniannya, ataupun dengan hasil industri rumah tangganya. Sementara itu, dengan sangat cepat lingkungan global berubah dan perdagangan dunia telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional, kondisi serbuan global seperti ini, makin tidak memungkinkan bagi petani mengambil peran penting dalam usaha pertaniannya, misalnya untuk mengatur mata rantai perdagangan hasil pertanian. Dalam skala lokal saja, petani belum mampu secara mandiri mengambil keputusan apa yang harus dilakukan atas hasil-hasil pertaniannya, apalagi dalam skala yang lebih tinggi, dalam lingkup nasional apalagi global. Ketidakberdayaan petani dalam menentukan nasibnya sendiri seharusnya merupakan alasan utama pemerintah dalam menentukan

program pembangunan pertanian, khususnya pembangunan sumber daya petani, pertanian dan kehidupan di desa-desa di Indonesia.

Gerard, seorang peneliti di *Focus on the Global South*, Bangkok, Thailand, menguraikan bagaimana perusahaan-perusahaan transnasional agribisnis bekerja. Perusahaan-perusahaan ini mampu menetapkan harga, menjatuhkan harga, menaikkan harga, dan mengatur mata rantai perdagangan di seluruh dunia. Sejak dari titik hulu, di mana benih diproduksi lewat rekayasa genetika, benih-benih tradisional dibajak dan dimatikan, dan perdagangan benih dikuasai, termasuk menguasai input pertanian, sejak dari pupuk, obat-obatan, pestisida dan lain-lainnya. Bank-bank pemerintah diprivatisasi agar tidak ada lagi bantuan kredit murah dan memakai bunga bank komersial. Kemudian, program-program pembangunan diarahkan ke paradigma pasar bebas dan pertanian neo-liberal, di mana semua ditentukan oleh pasar. Pinjaman utang diarahkan pada proyek-proyek pertanian berorientasi pasar dan ekspor. *Trans National Corporate* (TNC) menguasai mata rantai produksi hingga perdagangan sampai ke titik hilir penjualan di supermarket-supermarket. TNC di Negara maju mendapat subsidi pertanian milyaran dolar, sehingga mampu menjual dengan harga *dumping*. Kemudian melalui WTO, mereka mencoba membuat aturan-aturan pertanian global yang membuka pasar domestik negara-negara agraris yang sedang berkembang. Dengan ini, tarif bea masuk sebagai satu-satunya alat pertahanan sebuah Negara dilucuti. Bahkan, ke depan, industri pertanian dan pangan AS diproyeksikan akan bias mencukupi kebutuhan pangan seluruh dunia.

Setelah melihat uraian di atas, sangat jelas permasalahan kemiskinan, terutama di pedesaan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi ekonomi global dan pemikiran neo-liberalisme, para TNC akan terus berusaha menguasai pertanian dan pangan global tidak terkecuali di Indonesia. Namun, para elit politik, dan pemerintah Indonesia tidak kunjung mengangkat isu ini sebagai 'kata kunci' dari keterpurukan pertanian di Indonesia. Pasar bebas sering dianggap sebagai tren yang harus diikuti, sementara bangsa ini dalam kondisi tidak berdaya mengikuti irama global yang sangat dahsyat cepatnya. Apa boleh buat, petani dengan kekuatan desa tidak berdaya mengatasi hal ini sendirian, bahkan sangat mungkin, sebagian besar petani tidak menyadari, mengapa posisinya kini sangat lemah,

terutama dalam bidang yang dahulu menjadi andalan hidupnya. Perdagangan bebas yang menghasilkan peningkatan produksi, dan terjadinya kelebihan produksi, yang mendorong harga menjadi rendah. Pendapatan petani jatuh, sehingga petani terus berproduksi guna bertahan hidup.

Kini makin dapat dipahami, mengapa walaupun berbagai upaya pembangunan telah dilakukan melalui program-program pembangunan, sama sekali tidak membuat petani kita makin baik dan menjadi mandiri, tidak membuat kehidupan di desa makin sejahtera, bahkan perubahan yang berarti bagi kehidupan petani tidak terlihat nyata. Kehidupan di desa semakin susah, kemiskinan telah meningkat demikian tingginya, sebagai akibatnya, kini makin banyak lahan pertanian ditinggalkan, dan kehidupan bertani menjadi kurang menarik lagi. Ironi sekali, pemerintah di negeri agraris ini tak bisa berbuat banyak, bahkan para elit politik, terlihat sangat berpihak pada pemikiran pasar, yaitu membuka pintu negeri ini seluas-luasnya bagi akses pasar global, tanpa diimbangi dengan upaya menyadarkan petani atas kondisi global yang sedang belangsung, dan bersungguh-sungguh membangun ketahanan pangan nasional, mencari berbagai solusi untuk membangun kembali pertanian domestik dan mewujudkan kesejahteraan petani, yang jika benar-benar sejahtera, dapat menjadi simbol kesejahteraan rakyat Indonesia.

Apa yang sedang berlangsung di lumbung pertanian kita, di desa-desa, dengan kondisi petani dan pertanian yang memprihatinkan, merupakan lampu kuning bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah kemiskinan di desa ataupun di kota, di bagian barat atau di bagian timur negeri ini, serta mutu kehidupan petani dan keluarganya yang semakin rendah, banyaknya produk-produk impor mendominasi pasar lokal, menandakan petani-petani kita tidak mampu bersuara dan menentukan sikapnya dalam bidang yang digelutinya secara turun temurun. Semoga ini dapat menyadarkan pihak yang paling berkepentingan dalam pengambilan kebijakan nasional. Gambaran kehidupan desa-desa Indonesia yang produktif, keluarga petani yang maju, sehat, dan sejahtera, dengan lingkungan yang aman damai, rasanya makin sulit direalisasikan. Namun demikian, selama masih ada keinginan dan semangat untuk hidup untuk menjadi lebih baik dari sekarang, maka upaya-upaya untuk membebaskan diri dari segala keterbatasan,

tidak boleh hilang begitu saja. Artinya, petani Indonesia harus mampu bangkit dan menjadi penentu kehidupannya sendiri. Rasa bangga dan harga diri sebagai petani Indonesia harus dibangkitkan, ini tentu saja memerlukan model pembangunan yang sangat komprehensif, yang dilakukan serentak, dan harus melalui suatu proses penyadaran. Harus hadir program-program pembangunan pertanian yang tidak langsung berorientasi pada peningkatan produksi, namun pada tahap awal perlu lebih dahulu mengarah pada peningkatan mutu sumber daya individu petani dan keluarganya, menggiring petani untuk mengetahui kondisi yang berlangsung agar memiliki motivasi dan wawasan hidup yang positif. Terbangunnya gambaran mental yang lengkap dalam diri petani dan keluarganya tentang apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka di masa yang akan datang, akan mengarahkan petani dan keluarganya ke arah upaya mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut.

2.2 Potensi Sumberdaya Kehidupan di Desa

Sebagai Negara agraris, Indonesia seharusnya mampu menyelamatkan kehidupan di desa, beberapa pemikiran penting tentang hal ini didasarkan atas pemikiran agar masyarakat desa kembali bergairah menggulirkan roda kehidupannya, dilandasai dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat desa yang kuat, memiliki cita-cita, pandangan hidup yang maju serta meyakini bahwa dengan hidup di desapun bisa sejahtera, dan setiap orang mampu mencapai kesejahteraannya.

Tingkat kesejahteraan yang makin merosot, menyebabkan masyarakat yang masih berada di desa kini diterpa kebimbangan, apakah akan terus melakukan usaha tani atau pindah ke kota mengadu nasib seperti yang telah dilakukan saudara-saudaranya, hal ini harus dicegah melalui upaya penyadaran nasional yang berbasis lokal, masyarakat desa harus disadarkan bahwa desa menyimpan potensi yang sangat besar, yang jika dikelola dengan baik, mampu mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi-potensi tersebut antara lain :

1. Rasa kekeluargaan dan kebiasaan gotong royong
2. Kebersamaan latar belakang budaya dan adat istiadat

3. Telah memiliki mata pencaharian dasar, baik sebagai petani ataupun nelayan, ataupun sebagai pengrajin, yang berasal dari turun temurun, misalnya : kemampuan menenun, membantik, membuat keramik, dan lain sebagainya.
4. Adanya tetua-tetua adat yang dianggap sebagai orang yang disegani di desa, menandakan adanya kepemimpinan dalam masyarakat desa.
5. Teredainya lahan yang dapat digarap sebagai wadah produktif masyarakat.

Potensi-potensi tersebut perlu dikedepankan agar tidak hilang, bahkan menjadi dasar bagi pembangunan masyarakat desa. Pembangunan yang berakar dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, bukan pembangunan yang ditimpakan dari atas. Dengan tergali dan Bergeraknya potensi-potensi masyarakat secara dinamis, diharapkan masyarakat desa akan menyadari pentingnya kekuatan internal yang telah ada digerakkan untuk maju dan menciptakan kehidupan yang lebih baik di desa.

2.3 Alternatif Model Pembangunan Desa Berbasis Kekuatan Sumber Daya Masyarakat

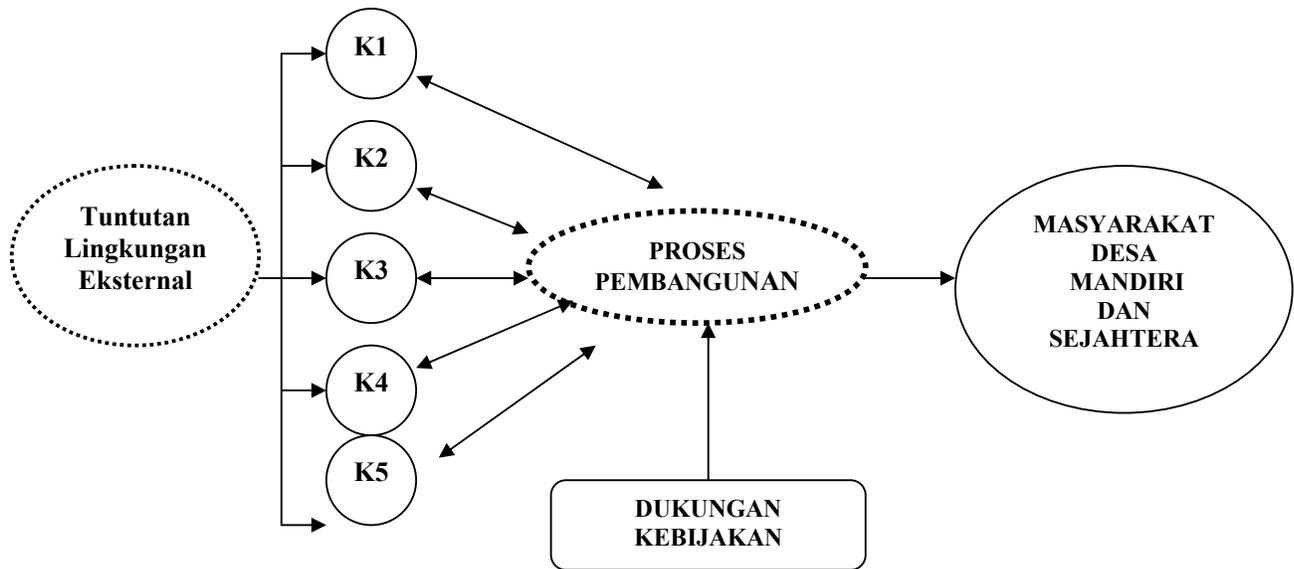
Memperhatikan potensi sumber daya kehidupan yang ada di desa dan berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan prosentase masyarakat miskin yang sebagian besar berdomisili di desa, maka dapat menjadi rujukan, bahwa kebijakan pembangunan desa seharusnya mampu dibangkitkan dari potensi-potensi yang ada tersebut. Selain itu, pengaruh lingkungan eksternal perlu diperhatikan, agar potensi yang dimiliki dapat dibangkitkan secara optimal, efektif, efisien, dan mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil kajian di atas, maka potensi sumber daya kehidupan di desa, jika dibangkitkan akan menghasilkan lima potensi kekuatan utama, yaitu :

1. Rasa kekeluargaan dan kebiasaan gotong royong jika dibangkitkan akan menghasilkan **kekuatan kerja sama kelompok** yang dinamis.
2. Kebersamaan latar belakang budaya dan adapt istiadat jika dibangkitkan akan menghasilkan **kekuatan mencintai tempat kelahirannya**, merupakan modal dasar untuk mengembangkan kehidupan di desa.

3. Adanya mata pencaharian dasar (petani, nelayan, pengrajin, dan sebagainya) jika dibangkitkan akan menghasilkan **kekuatan sektor unggulan** di desa.
4. Adanya tetua-tetua adat yang dianggap sebagai orang yang disegani di desa, menandai adanya kepemimpinan dalam masyarakat desa, jika dibangkitkan akan menghasilkan **kekuatan kepemimpinan** dalam masyarakat, yang akan sangat berperan dalam membuat suasana yang kondusif, menjalankan fungsi koordnatif dan sebagai organisator pembangunan di desa, yang benar-benar dipercaya masyarakat.
5. Lahan dan sumber daya alam yang dapat digarap dan dikelola sebagai wadah produksi masyarakat, jika dibangkitkan dan dikelola dengan baik, jika dibangkitkan akan menghasilkan **kekuatan produksi masyarakat**.

Kekuatan-kekuatan di atas, yaitu : (1) kekuatan kerja sama kelompok, (2) kekuatan cinta tempat kelahiran/mencintai desa, (3) kekuatan sektor unggulan, (4) kekuatan kepemimpinan, dan (5) kekuatan produksi masyarakat, merupakan modal dasar untuk membangun desa. Kemudian, memperhatikan lingkungan eksternal dan tuntutan globalisasi, di mana ada tantangan dan peluang, dibutuhkan kemampuan masyarakat desa untuk mampu berkompetisi agar dapat mengakses pasar, yang dimulai dari pasar lokal, dan sebagai syarat utama untuk dapat mengakses pasar adalah kemampuan masyarakat desa sendiri, yang ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan desa secara komprehensif.

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki, kemudian disinergikan dengan tuntutan lingkungan eksternal akan menghasilkan hubungan-hubungan yang positif dan merupakan dasar bagi hadirnya model pembangunan desa berbasis kekuatan sumber daya masyarakat, hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Pembangunan Desa Berbasis Kekuatan Sumber Daya Masyarakat

III. SOLUSI PERMASALAHAN KEMISKINAN PERDESAAN

Desa Industri Berbasis Pertanian Industri

Desa industri berbasis pertanian industri merupakan suatu sistem yang subsistemnya terdiri atas industri primer, sekunder, dan tersier. Semua itu merupakan satu sistem yang satu sama lain ada *interconnection*-nya. Karena merupakan satu sistem, tidak akan mungkin sistem itu berjalan mulus kalau semua subsistemnya tidak bergerak lancar. Artinya lancar, bisa menyejahterakan dan berkelanjutan. Jangan sampai terjadi, industri tersiernya menikmati nilai tambah berlebih-lebih, sedangkan industri primer dan sekundernya terpuruk. Sistem ini berada di desa sehingga pengawasan terhadap jalannya sistem ini dapat ditegakkan. Industri primer mungkin berada di luar desa, tetapi sebisa mungkin masih terkait dekat dengan keseluruhan sistem.

Desa industri tidak harus mendirikan pabrik - pabrik di desa. Dalam era Orde Baru, memang ada credo pembangunan yang bunyinya industrialisasi yang ditunjang pertanian tangguh. Nyatanya memang ada industrialisasi, ada industri besar didirikan di desa-desa dengan prasarananya, tetapi desanya digusur dan

lahan sawahnya menjadi pabrik-pabrik. Penduduk desa terpaksa mengungsi entah ke mana.

Yang penting adalah membangun mental berindustri di kalangan pedesaan. Artinya, mendidik masyarakat desa dari mental sekadar menjual produk ke menjual produk bahan industri. Mengubah orientasi demikian memerlukan proses pendidikan masyarakat. Produk yang semula bisa asal-asalan karena tidak adanya hubungan antara produk hari ini dan produk besoknya, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya, dengan orientasi industri harus diubah. Kontinuitas berproduksi harus bisa dijamin.

Sebagai contoh sederhana misalnya proses industri sekunder. Seorang petani gurem yang menghasilkan sayuran bayam. Semula hanya berorientasi menjual produknya langsung ke pasar desa. Apa adanya saja dipikul ke pasar. Kalau mental demikian harus diubah menjadi bermental pertanian industri, produknya harus dipersiapkan untuk diproses industri di desanya. Prosesnya berupa pembersihan (*cleaning*), memotong akarnya, memilah (*grading*), menyeleksi berdasar jumlah daunnya, mengepaknya, selanjutnya baru transportasinya ke pasar.

Dengan demikian, petani gurem itu harus membentuk kelompok karena tidak mungkin proses industri tersier itu hanya mengerjakan sejumlah kecil produk. Produk bayamnya pun harus dari jenis yang sama. Ini menuntut industri primer dapat menyediakan benih bayam yang bermutu baik dan benar. Dengan demikian, desa industri bayam ini prosesnya tidak sederhana, yang harus didukung suatu bentuk pertanian industri. Jelas memerlukan mental switch yang hanya bisa tercapai melalui program pendidikan masyarakat.

Contoh lain adalah industri perberasan. Sebenarnya dengan pengorganisasian kelembagaan Bulog sudah diwujudkan suatu sistem industri yang lengkap. Di situ ada industri primernya, sekunder, dan tersiernya. Katakanlah ada industri benih padi sebagai industri primer, petani-petani kelompok Insus sebagai industri sekunder, dan penggilingan beras sebagai industri tertier. Kalau paradigma desa industri berbasis pertanian industri dipakai seharusnya tidak boleh manajerial Bulog-nya begitu mewah misalnya, sedangkan petani di industri sekundernya tetap terpuruk nasibnya. Desa industri berbasis

pertanian industri mengharuskan mental ketiga subsistem menyatu sebagai mental industri yang menopang desa industri sebagai satu sistem.

Kondisi demikian itu sama saja seperti industri gula di zaman kolonial Belanda dulu. Bandingkan antara manager di pabrik gula dan petani tebu yang menghasilkan batang-batang tebunya sebagai buruh di lahannya sendiri yang disewa pabrik, sangat asimetris. Meskipun pabrik gula itu terletak di desa dan disebut pula sebagai agroindustri, tetapi tidak dalam rangka pikir industri tersier sistem desa industri. Industri gula merah dari tebu yang dilaksanakan penduduk desa di lahan pertanaman tebu di zaman Belanda dulu lebih mendekati paradigma desa industri itu. Industri itu meski sederhana, milik orang desa.

Pertanian industri (jangan keliru dengan agroindustri) hendaknya masuk dalam program desa industri. Begitu juga program tersiernya, termasuk pemasaran produk tersiernya. Semuanya harus holistik karena merupakan satu sistem. Misalnya, desa industri memprogramkan produk tertier berupa minyak atsiri, kecap, dan jamu. Semua itu produk industri tertier. Baik pemasarannya maupun produk bahan bakunya (industri sekunder) dan benih/bibit (industri primer) harus disiapkan secara cermat.

Modal utama pembangunan pertanian yaitu lahan. Lahan pertanian (yang mungkin ditanami) Indonesia hingga tahun 2000 seluas 30,45 juta hektar yang terdiri atas 7,79 juta hektar lahan basah (*wetland*), 12,94 juta hektar lahan kering dan 9,72 juta hektar lahan yang sementara bera yang menghasilkan sekitar 7,2 lahan pertanian permanen. Modal lahan pertanian permanen itu menghasilkan 11,45 juta hektar lahan panen padi pada tahun 2003. Itu berarti sebetulnya Indonesia mempunyai modal utama yang sangat baik. Barangkali untuk mengurangi risiko kegagalan, perlu digagas siasat lain dalam membangun pertanian, yaitu dengan memilih jenis tanaman selain padi, jagung dan kedelai.

Jenis komoditas itu adalah tanaman perkebunan, yang hingga tahun 2003 catur wulan III yang lalu sumbangannya terhadap PDB menempati urutan kedua, sebesar Rp 14,2 triliun. Jenis tanaman perkebunan yang dipilih harus memiliki rentang penggunaan dan pengolahan yang luas, sekaligus cocok untuk agroklimat Indonesia, misalnya tebu dan kelapa sawit. Untuk kedua jenis tanaman ini,

Indonesia termasuk negara produsen besar di tingkat dunia – kedua untuk kelapa sawit dan ke-14 untuk tebu.

Kedua jenis tanaman ini juga cocok untuk lahan pertanian di luar Pulau Jawa yang banyak cadangan lahan keringnya. Jadi prinsipnya dengan tanaman perkebunan yang rentang pengolahan dan penggunaannya luas itu, dibuka dulu kantong-kantong perekonomian berupa pedesaan industri berbasis pertanian. Setelah itu kemungkinan pengembangannya dapat dua arah. Pertama sedikit demi sedikit para pekebun mengonversikan sebagian lahannya menjadi pertanaman padi. Untuk tebu masih memungkinkan dengan rotasi tanaman. Untuk kelapa sawit dapat dengan pertanaman ganda (*multiple cropping*) yang membutuhkan varietas padi yang cocok, sehingga mutlak adanya keterlibatan para pemulia dan produsen benih padi (industri primer).

Modal lainnya adalah petani atau tenaga kerja itu sendiri. Indonesia memiliki potensi sumberdaya manusia yang besar. Akan tetapi sebagian besar sumberdaya manusia Indonesia adalah petani gurem, yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha (27.3%). Pengusaha pertanian menempati posisi kecil saja (6.2%) (Tabel 2). Oleh karena itu dibutuhkan ketekunan bertindak, dan dedikasi tinggi. Hal ini hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Namun, sekiranya bisa berhasil, dampaknya akan sangat luas. Petani, peternak, atau nelayan di pedesaan akan lebih bisa berpikir rasional dan selalu akan mengupayakan bisa bekerja seefisien mungkin. Seperti pada industri perberasan, misalnya, petani padi akan berpikir ke arah konsolidasi agronomi yang selanjutnya sampai pada konsolidasi lahannya. Dalam sistem desa industri pada akhirnya akan memerlukan manajer-manajer profesional yang kualifikasinya tentu sarjana.

Tabel 2. Persentase Penduduk Menurut Golongan Rumah Tangga

No.	Golongan Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	
		1975	1993
1.	Buruh Tani	11.7	10.0
2.	Petani Gurem (< 0,5 ha)	22.2	27.3
3.	Pengusaha Pertanian (0,5-1 ha)	12.0	6.2
4.	Bukan Pertanian Golongan Rendah di Desa	14.7	8.9
5.	Bukan Angkatan Kerja di Desa	3.0	1.6
6.	Bukan Pertanian Golongan Atas di Desa	6.0	13.0
7.	Bukan Angkatan Kerja di Kota	1.5	2.6
8.	Bukan Pertanian Golongan Atas di Kota	6.1	11.8

Dengan paradigma baru itu tentu para pengelola perguruan tinggi pertanian harus membuka mata akan kebutuhan perubahan pandangan dalam menghadapi pertanian industri itu. Begitu pula dalam memprogramkan suatu bentuk pendidikan masyarakat yang bisa efektif mengubah mental petani, sehingga bisa berorientasi industri. Bukan industri di luar jangkauannya, tetapi industri yang lahir di desa, oleh orang desa, di dalam suatu sistem desa industri.

Program ini tentu tidak bisa dicapai dalam waktu pendek, harus diprogramkan bertahap dan berjangka panjang, tetapi konsisten. Benar-benar program pembangunan desa yang bukan sekadar insidental, melainkan program pembangunan yang ada filosofinya, yang pada akhirnya bisa membudaya.

Desa Nelayan Menuju Industri Nelayan Berbasis Masyarakat, Wilayah dan Sektor Unggulan

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan, disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern. Faktor intern, lebih mengarah pada budaya masyarakat nelayan yang masih bersifat tradisional seperti dalam mengelola pendapatannya, nelayan tidak mempunyai upaya pengelolaan yang baik. Hal ini karena selama ini pendapatan nelayan masih sering bocor dan bersifat konsumtif, sekali dapat uang langsung dibelanjakan tanpa ada upaya untuk menabung.

Sementara itu faktor ekstern lebih mengarah pada kebijakan pemerintah selama ini yang tidak berpihak pada nelayan, disamping itu usaha perikanan sangat tergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat sangat tergantung pada faktor-faktor tersebut, yaitu:

Pertama, kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi ekosistem dan lingkungan yang rentan pada kerusakan khususnya pencemaran dan degradasi kualitas lingkungan.

Kedua, persoalan yang sangat menyolok pada nelayan adalah ketergantungan pada musim, dimana pada musim paceklik nelayan tidak dapat melaut, sementara usaha dibidang lainnya mereka kurang keahliannya, dan kondisi ini diperparah dengan budaya nelayan yang jika mendapatkan uang langsung dihabiskan. Dengan demikian pendapatan nelayan sangat fluktuatif, pada saat panen mereka berfoya-foya dan jika musim paceklik tiba, mereka

meminjam uang dari rentenir agar kehidupannya dapat berlangsung. Pada masyarakat nelayan, mereka akan berbondong-bondong membelanjakan uangnya saat musim panen dengan ramainya pasar dan hal ini musim panen bagi para pedagang, dan kondisi sebaliknya terjadi, nelayan akan mencari hutang, tanpa diindahkan hutang ke “tukang kredit” yang bunganya mencekik.

Ketiga, ketergantungan nelayan pada pasar, hal ini disebabkan karena komoditas yang dihasilkan harus segera dijual disamping karena ikan cepat busuk juga karena mereka segera untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karakteristik ini mempunyai implikasi nelayan sangat peka terhadap perubahan harga, perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.

Namun dibalik hal tersebut, ada faktor ketergantungan sosial nelayan karena posisi tawar menawar yang lemah, ketergantungan sosial yang besar ini, menyebabkan mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya kedalam lingkaran setan kemiskinan.

Dengan demikian konsep desa nelayan industri yang berbasis masyarakat perlu dikembangkan. Industri nelayan berbasis masyarakat adalah suatu desa industri perikanan yang dalam pengembangannya terlebih dahulu memenuhi terhadap kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasi masyarakat. Hal ini juga menyangkut pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan mereka.

Pembangunan perikanan hendaknya dilakukan berdasarkan pendekatan sistem bisnis perikanan secara terpadu, sehingga arah dan kebijakan pembangunan merefleksikan kegiatan dari seluruh fungsi sub sistem perikanan yang meliputi pembangunan sub-sistem budidaya, sub-sistem penangkapan, sub-sistem pasca panen dan pemasaran yang ditunjang oleh pembangunan sub-sistem kesehatan ikan dan lingkungannya serta pembangunan sub-sistem prasarana perikanan. Dalam pembangunan perikanan berkelanjutan hendaknya sesuai dengan amanat FAO (1995) melalui Code of Conduct for Responsible Fisheries, sehingga arah pembangunan perikanan dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang bertanggungjawab dengan memadukan elemen daya dukung dan pengendalian

lingkungan. Serta nelayan sebagai obyek pembangunan jangan sampai dikesampingkan. Selain hal tersebut pembangunan perikanan juga didasarkan kepada pendekatan wilayah sesuai dengan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah yang bersangkutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari Makalah ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia, untuk lebih mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi di perdesaan.
2. Program-program pembangunan perdesaan yang dijalankan pemerintah selama ini seperti Program Pusat Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD), KOGM (Komando Gerakan Makmur), Bimas (Bimbingan Massal), Inmas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), Supra Insus dan kredit usaha tani (KUT) belum menunjukkan hasil yang mengembirakan, hal ini karena kemiskinan di perdesaan masih terjadi.
3. Kegagalan Pembangunan Perdesaan disebabkan antara lain; *pertama*, program yang dilaksanakan seragam yang diberlakukan secara nasional, , tanpa memperhatikan potensi masing-masing desa, *kedua*, program tersebut gagal mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakat desa, *ketiga*, Faktor lingkungan yang berubah dengan sangat cepat tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan pola dan program pembangunan desa, *keempat*, masyarakat desa masih cenderung pasif dan menerima apapun yang ditentukan pemerintah, *kelima*, SDM yang sangat terbatas dan posisi yang lemah karena ketidakterwakilannya di ‘panggung’ politik, *keenam*, Tidak berpihaknya pemerintah untuk sepenuhnya mengembangkan ekonomi kerakyatan, dan *ketujuh* Ketidakmampuan petani mengambil berbagai keputusan penting dalam kegiatan usahanya.
4. Ada beberapa potensi sumberdaya kehidupan yang dimiliki oleh Desa, antara lain : rasa kekeluargaan dan kebiasaan gotong royong, Kebersamaan latar belakang budaya dan adat istiadat, telah memiliki mata

pencaharian dasar, adanya kepemimpinan dalam masyarakat desa, dan teredainya lahan yang dapat digarap

Saran

Dari kesimpulan diatas dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Pembangunan yang melibatkan masyarakat desa hendaknya memperhatikan beberap hal antara lain; potensi desa, memadukan strategi pendekatan pembangunan antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional.
2. Segenap potensi yang ada pada desa hendaknya mampu didayagunakan guna mendukung program pemerintah dalam mengatsai kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Iwan Jaya. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bappenas. 2001. Studi Analisis Kemiskinan. Bappenas. Jakarta
- Biro Pusat Statistik. 1993. Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia, 1976-1993. Biro Pusat Statistik. Jakarta
- Biro Pusat Statistik. 1994. Laporan Hasil Sensus Pertanian 1993: Pendaftaran Rumah Tangga. BPS. Jakarta
- BPS. 2004. Biro Pusat Statistik Indonesia. www.bps.go.id (20 Maret 2005)
- Haeruman, Herman J.S. 1997. Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Masyarakat Desa: kearah integrasi perekonomian kota-desa. Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Perdesaan Indonesia. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hikmat. Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Greenfield Gerad. 2004. Pasar Bebas yang Menghancurkan Petani. Institute For Global Justice. Jakarta.
- Sadjud, S. 2004. Desa Industri Berbasis Pertanian Industri (Titipan untuk Capres dan Cawapres). Kompas, 14 Mei 2004.
- Sayogyo. 2002. Pertanian dan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat. www.ekonirakyat.org (20 Maret 2005)
- Soedrajat. 1997. Identifikasi Tipologi Kawasan Pedesaan. Prosiding Diskusi Terfokus: Pengelolaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan.
- Tjandrawan, Iwan. 1994. Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Nasional. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Widodo, W.D. 2004. Modal Utama untuk Desa Industri Berbasis Pertanian. Inovasi, Agustus 2004.